

**HUBUNGAN EFISIENSI ANGGARAN DENGAN EFEKTIVITAS
PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2025
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALAKA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANTONIETA CHRISTIFERA ANANTA P. NERI

NIT. 22314090

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026**

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration (PTSL) Program is a government program aimed at providing legal certainty of land ownership through accelerated land registration. The implementation of the 2025 budget efficiency policy requires optimal budget management in program implementation. Geographical and accessibility conditions in Malaka Regency present challenges to PTSL implementation. This study aims to analyze the relationship between budget efficiency and the effectiveness of the PTSL Program and to examine its implementation before and after the implementation of the budget efficiency policy at the Land Office of Malaka Regency.

This study employed a mixed methods approach with a sequential explanatory design. Quantitative data were collected through questionnaires distributed to 40 respondents using saturated sampling and analyzed using validity, reliability, normality, Pearson Product Moment correlation, and hypothesis testing. Qualitative data were obtained through interviews and documentation to further explain the quantitative findings and examine PTSL implementation before and after the budget efficiency policy.

The results showed a positive and significant relationship between budget efficiency and PTSL effectiveness, with a correlation coefficient of 0.573 and a significance value of < 0.001 . The relationship was moderate and positive, indicating that increased budget efficiency tended to be accompanied by increased PTSL effectiveness. Qualitative findings showed that proper budget management, coordination among staff, and community participation supported the effective implementation of PTSL after the budget efficiency policy was implemented.

Keywords: Budget efficiency, effectiveness, Complete Systematic Land Registration (PTSL).

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Batasan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Literatur	6
B. Landasan Teori	10
C. Kerangka Pemikiran	17
D. Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian	21
B. Lokasi Penelitian	22
C. Jenis dan Sumber Data	22
D. Teknik dan Pengumpulan Data.....	25
E. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
F. Definisi Operasional Variabel.....	28

G. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV.....	37
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	37
B. Keadaan Penduduk	39
C. Keadaan Pertanian.....	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil.....	45
1. Hubungan antara Efisiensi Anggaran dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka	45
2. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebelum dan Setelah Diterapkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran	55
B. Pembahasan.....	69
1. Hubungan antara Efisiensi Anggaran dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka	69
2. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebelum dan Setelah Diterapkannya Kebijakan Efisiensi Anggaran	71
3. Integrasi Hasil Kuantitatif dan Kualitatif.....	73
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai aset sosial yang menjaga keterikatan antarwarga maupun sebagai aset ekonomi yang berfungsi sebagai modal pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, belum adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah kerap menimbulkan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk yang melibatkan antarinstansi. Prosedur birokrasi yang berbelit, lamanya proses penerbitan sertifikat, serta lokasi layanan yang sulit dijangkau menyebabkan rendahnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya secara legal. Kondisi tersebut mengakibatkan masih banyak bidang tanah yang hanya memiliki bukti sporadik yang belum memberikan kekuatan hukum sebagai tanda kepemilikan. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, tingginya jumlah sengketa tanah menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat hak atas tanah (SHM) sangat diperlukan sebagai jaminan kepastian hukum (Lette, 2025).

Menurut laporan detikFinance (2025) Kementerian ATR/BPN mencatat 6.015 kasus sengketa tanah dalam satu tahun terakhir (hingga Oktober 2025), dengan 3.019 kasus berhasil diselesaikan atau sekitar 50%. Hingga September 2025, jumlah kasus yang ditangani mencapai 3.260 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya jumlah sengketa tanah di Indonesia perlu ditangani melalui kepastian hukum dan kepemilikan hak atas tanah yang jelas.

Kepemilikan tanah yang sah dan jelas merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sebagai negara yang berbasis agraris, tanah memiliki posisi strategis bagi masyarakat, baik sebagai sumber penghidupan, tempat bermukim, maupun sebagai sarana investasi. Namun demikian, berbagai persoalan agraria seperti ketidakpastian

status hak atas tanah, sengketa pertanahan, serta lemahnya kepastian hukum masih sering ditemukan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) menetapkan kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kantor Pertanahan merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan pada tingkat kabupaten/kota. Kantor Pertanahan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak atas tanah, serta penerbitan sertifikat sebagai bukti legalitas kepemilikan tanah. Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kantor Pertanahan berperan sebagai pelaksana utama yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, sosialisasi, pengumpulan data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat tanah. Selain itu, Kantor Pertanahan juga berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun penggunaan anggaran.

Di Kabupaten Malaka, Kantor Pertanahan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kepastian hukum atas tanah. Dengan kondisi wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas, Kantor Pertanahan dituntut untuk mampu mengelola sumber daya dan anggaran secara efektif dan efisien agar target program dapat tercapai. Oleh karena itu, kinerja Kantor Pertanahan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan PTSL di daerah tersebut.

Pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menetapkan kebijakan baru, salah satunya terkait efisiensi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran 2025. Kebijakan ini diarahkan

untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan anggaran negara agar alokasi dana dapat difokuskan secara lebih tepat pada program-program prioritas pemerintah. Penerapan efisiensi anggaran juga menjadi bagian dari upaya penghematan guna membuka ruang pembiayaan bagi program strategis lainnya. Ketentuan mengenai kebijakan tersebut diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rizky, 2025).

Efisiensi anggaran menuntut penggunaan sumber daya yang lebih optimal dengan biaya yang lebih rendah. Di sisi lain, pelaksanaan PTSL memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menjangkau wilayah yang luas, kondisi geografis yang sulit, serta kebutuhan operasional di lapangan. Kondisi ini menimbulkan potensi kesenjangan antara upaya efisiensi anggaran dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan program.

Pemilihan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka sebagai lokasi penelitian dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka masih aktif melaksanakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah, sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan program.

Petugas pelaksana PTSL harus menjangkau lokasi-lokasi yang berjauhan, sehingga membutuhkan perencanaan anggaran yang matang agar tetap efisien. Dari sisi sosial, sebagian masyarakat masih memiliki tingkat pemahaman yang beragam terkait pentingnya pendaftaran tanah. Apabila pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara efisien, maka pelaksanaan PTSL dapat mengalami hambatan berupa keterlambatan penyelesaian sertifikat, tidak tercapainya target bidang tanah, serta menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang mengkaji hubungan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana hubungan antara efisiensi anggaran

dengan efektivitas pelaksanaan program, serta menjadi dasar rekomendasi bagi peningkatan kinerja dan pengelolaan anggaran PTSL di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran terhadap efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka?
2. Bagaimana pelaksanaan Program PTSL sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan yang signifikan antara efisiensi anggaran terhadap efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten malaka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi pertanahan dan manajemen keuangan publik, dengan menambah bukti empiris mengenai hubungan antara efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Pelaksana (BPN/Kantor Pertanahan)

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan anggaran Program PTSL agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif.

b. Bagi Pemerintah Daerah dan Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian anggaran PTSL, khususnya dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

c. Bagi Masyarakat

Secara tidak langsung, penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran tanah sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hak tanahnya.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait efisiensi anggaran, efektivitas program pemerintah, dan Program PTSL.

E. Batasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka, sehingga hasil penelitian terbatas pada karakteristik lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasikan secara luas.
2. Penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara efisiensi anggaran dengan efektivitas Program PTSL, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain di luar penelitian yang mungkin berhubungan dengan efektivitas program.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara efisiensi anggaran dengan efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Hal tersebut dibuktikan melalui hasil uji korelasi Pearson Product Moment yang memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,573 dengan nilai signifikansi $<0,001$ ($<0,05$). Nilai koefisien korelasi tersebut menunjukkan tingkat hubungan sedang dengan arah hubungan positif. Hubungan sedang berarti efisiensi anggaran memiliki keterkaitan yang cukup berarti dengan efektivitas Program PTSL. Artinya, semakin baik efisiensi anggaran, maka cenderung diikuti dengan meningkatnya efektivitas pelaksanaan PTSL. Namun, hubungan tersebut belum termasuk kuat, sehingga efektivitas PTSL tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran, tetapi masih terdapat faktor-faktor lain di luar variabel yang saya teliti

Hasil analisis kuantitatif tersebut didukung oleh hasil wawancara dan analisis dokumen yang menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap tahapan pelaksanaan Program PTSL, mulai dari penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengukuran bidang tanah, hingga penerbitan sertipikat. Pengelolaan anggaran yang tepat guna, disertai koordinasi yang baik antarpegawai, dukungan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat, mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan efektivitas pelaksanaan Program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka. Semakin baik pengelolaan dan pemanfaatan anggaran, maka semakin tinggi pula efektivitas pelaksanaan Program PTSL.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang optimal agar efektivitas Program PTSL dapat terus ditingkatkan. Selain itu, koordinasi antarpegawai, kerja sama dengan pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program PTSL. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan efektivitas Program PTSL atau melakukan penelitian pada lokasi yang berbeda agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V., Herliana, A., & Korespondensi, E. P. (2025). *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN] Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025 dengan Text Mining dan Natural Language Processing*.
- Aris, M., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2021). Efektifitas Pelayanan Aparatur Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Journal Governance and Politics (JGP)*, 1(2), 127-133.
- Ayu, I. K. (2019). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 27-40.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka. (2025). *Statistik Daerah Kabupaten Malaka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka.
- Cahyadi, B. B. N., & Nawangsari, E. R. (2022). Efektivitas program PTSL sebagai perlindungan hukum hak atas tanah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 369–375.
- Cahyani, S. N. (2024). *Hubungan tingkat kepuasan belajar dengan hasil belajar peserta pelatihan* [Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia]. Repository Universitas Pendidikan Indonesia.
- Dwifarchan, R. M. R., & Sulistiyanti, U. (2023). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 23-33.
- Elkas, W. D., Pujiwati, Y., & Nugroho, B. D. (2023). Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat adat Minangkabau. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 7(1), 1-14.
- Fajri, C., Amelya, A., & Suworo, S. (2022). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Indonesia Applicad. *JIIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 369-373.
- Febriyanti, B. N. (2023). *Teknik pengambilan sampel* [Makalah tidak dipublikasikan]. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.
- Firdaus, R. (2019). Efektivitas Pelayanan Administrasi Di Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 2(2), 61-71.
- Hijriani, A., Muludi, K., & Andini, E. A. (2017). Implementasi metode regresi linier sederhana pada penyajian hasil prediksi pemakaian air bersih pdam way rilau kota bandar lampung dengan sistem informasi geofrafis. *Jurnal Informatika Mulawarman*, 11(2), 37-42.

- Hutami, W. F. (2024). Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Public Relations Mercu Buana*, *Query date*, 21, 23.
- Kusuma, A. R., & Wicaksono, B. (2020). Efektivitas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah. *Jurnal Ilmiah Pertanahan*, 10(2), 89–101.
- Lette, N. A., Niga, J. D., & Benyamin, R. A. (2025). Efektivitas pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dalam rangka pemberian sertifikat gratis (studi pada Kelurahan Manulai II). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 3(1) 330-346.
- Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 183, 196.
- Musgrave, R.A., & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana: jurnal ilmiah ilmu komunikasi*, 13(2), 177-181.
- Pratama, D. A. (2019). Analisis pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kantor pertanahan. *Jurnal Agraria dan Tata Ruang*, 5(1), 45–60.
- Pujihastuti, I. (2010). Prinsip penulisan kuesioner penelitian. *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*, 2(1), 43-56.
- Putra, P. B. A. A. (2019). Pengembangan aplikasi kuesioner survey berbasis web menggunakan skala likert dan guttman. *Jurnal Sains dan Informatika p-ISSN*, 2460, 173X.
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62-70.
- Rizky, G. M., Tanzil, V. J., Rafi, A., Pasara, D., Kusumo, R., & Tiasono, E. J. (n.d.). *Dampak Efisiensi Anggaran pada ATR/BPN Kota Tangerang: Optimalisasi Layanan Pertanahan dan Iklim Investasi*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v9i2>
- Salman, S., & Ikbali, M. (2025). Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi. *Journal of Economics Development Research*, 1(2), 68–72. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i2.99>
- Sedarmayanti. (2014). *Dasar-dasar Pengetahuan tentang Manajemen Perkantoran*. Bandung: Mandar Maju.

- Setiawan, A. (2025). Penelitian metode campuran (mixed method). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1484-1491.
- Setyawan, D. A. (2014). Hipotesis. *Kementerian Kesehatan RI Politeknik Kesehatan Surakarta*, 2.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan populasi dan sampel: Pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721-2731.
- Sugiyarto, S., Qomariyah, S., & Hamzah, F. (2013). Analisis network planning dengan cpm (critical path method) dalam rangka efisiensi waktu dan biaya proyek. *Matriks Teknik Sipil*, 1(4), 408.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110-116.
- Susanto, P. C., Arini, D. U., Yuntina, L., Soehaditama, J. P., & Nuraeni, N. (2024). Konsep penelitian kuantitatif: Populasi, sampel, dan analisis data (sebuah tinjauan pustaka). *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 3(1), 1-12.
- Triana, R. A., Bustami, D. S., & Said, M. F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gowa. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).
- Ulya, S. F., Sukestiyarno, Y. L., & Hendikawati, P. (2018). Analisis prediksi quick count dengan metode stratified random sampling dan estimasi confidence interval menggunakan metode maksimum likelihood. *UNNES journal of mathematics*, 7(1), 108-119.

Undang Undang Dasar

- Indonesia. (1997). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.
- Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*.

Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Website

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-8225678/bpn-catat-3-260-kasus-sengketa-hingga-konflik-pertanahan-hingga-september-2025>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malaka